

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 pasal 1 ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Komara, 2012).

Berdasarkan wewenang pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu: 1) **Pajak Pusat**, adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat ini diatur oleh Undang-Undang (UU) dan hasilnya akan masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 2) **Pajak Daerah**, menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat. Pajak daerah diatur oleh Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Awal dimulainya otonomi daerah ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut selalu berupaya untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain. Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai kontribusi terbesar di Kabupaten Trenggalek adalah lain-lain PAD yang sah namun pajak daerah disini masih sangat kurang berkontribusi terhadap PAD. Adapun beberapa jenis pajak daerah yang mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Trenggalek diantaranya adalah (1) pajak hotel dan restoran, (2) pajak hiburan, (3) pajak reklame, (4) pajak penerangan jalan, (5) pajak parkir, (6) pajak air tanah, (7) pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (8) Bea Perolehan Hak atas Tanah

Bangunan, dan (9) Pajak Bumi & Bangunan. Mengingat Kabupaten Trenggalek mempunyai beberapa penerimaan pajak daerah yang cukup lengkap harusnya pajak daerah disini berkontribusi lebih banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak daerah adalah kepatuhan Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak harus mempunyai kesadaran arti pentingnya pajak daerah. Apabila Wajib Pajak membayar dan melaporkan pajak terutangnya tidak tepat waktu, kondisi ini akan mempengaruhi dalam pengukuran kinerja penerimaan pajak. Mengingat besarnya peran pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah dalam komponen PAD, penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar potensi pajak daerah dan kontribusi pada PAD di Kabupaten Trenggalek yang dituangkan dalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul **“Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Trenggalek”**.

1.2. Penjelasan Judul

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya salah paham terhadap judul tugas akhir ini, maka penulis akan memberikan pengertian mengenai judul tugas akhir tersebut.

Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah, sesuatu yang digolongkan atau dikelompokkan kembali

menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya (Sasongko, 2006).

Kinerja

Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi dan kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuannya (Hariandja, 2002).

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK. I maupun pemerintah daerah TK. II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (Marsyahrul, 2005).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Warsito, 2001).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pajak daerah yang terdapat di Kabupaten Trenggalek selama periode tahun 2015 hingga tahun 2017?

2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Trenggalek selama periode tahun 2015 hingga tahun 2017?
3. Bagaimana cara Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Trenggalek dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui kinerja pajak daerah yang terdapat di Kabupaten Trenggalek selama periode tahun 2015 hingga tahun 2017.
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Trenggalek selama periode tahun 2015 hingga tahun 2017.
3. Untuk mengetahui cara Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Trenggalek dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

1.5. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan diadakan penelitian ini, dapat memperoleh manfaat antara lain yaitu:

1. Bagi Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kab. Trenggalek

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Trenggalek dalam

mengambil kebijakan-kebijakan dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.

2. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Penelitian digunakan sebagai referensi oleh mahasiswa STIE Perbanas Surabaya sebagai bahan masukan bagi pihak berkepentingan khususnya bagi mahasiswa Diploma III dalam menyusun laporan Tugas Akhir.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang perpajakan khususnya mengenai kinerja penerimaan pajak daerah terhadap komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Serta sebagai referensi untuk pembuatan laporan Tugas Akhir atau penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dalam bidang studi yang dibahas khususnya mengenai Kinerja Penerimaan Pajak Daerah di Badan Keuangan Daerah serta memberikan kesadaran bagi penulis bahwa penelitian yang dilakukan merupakan pengembangan dari ilmu yang sudah dipelajari selama di perkuliahan.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 metode yaitu Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis.

1.6.1. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yang penulis peroleh selama penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara langsung di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek untuk memperoleh data aktual mengenai penerimaan pajak daerah terhadap komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan kisi-kisi pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Pertanyaan Wawancara

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana kinerja pajak daerah di Kabupaten Trenggalek tahun 2015, 2016 dan 2017 ?
2.	Bagaimana kontribusi pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Trenggalek?
3.	Bagaimana cara Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna untuk pembiayaan pengeluaran daerah?
4.	Apa saja kendala/hambatan yang dialami Badan Keuangan Daerah kabupaten Trenggalek dalam pemungutan pajak daerah?
5.	Apa yang harus dilakukan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi?

2. Data sekunder

Data sekunder yang penulis peroleh selama penelitian yaitu pengambilan data di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek khususnya data pajak daerah dan data Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Trenggalek.

1.6.2. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui:

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait yaitu bidang pelayanan pajak di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek mengenai pajak daerah.

2. Dokumentasi

Untuk memperoleh data sebagai bahan pendukung dalam penulisan Tugas Akhir ini maka penulis melakukan pengumpulan data yang bersumber dari laporan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.6.3. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Pengumpulan informasi dan data yang berhubungan dengan pajak daerah.
- b) Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada.
- c) Mengolah data dengan membandingkan data pajak daerah tahun 2015 hingga tahun 2017.
- d) Menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai pemberi masukan dalam perbaikan masalah yang ada pada data yang didapat yang berhubungan dengan kinerja penerimaan pajak daerah pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.